

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan menjadi salah satu tujuan dari negara Indonesia, dimana hal ini tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan nasional yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Hal ini dipertegas dengan sila pada Pancasila sebagai dasar negara, terutama sila kelima "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dan sila kedua "kemanusiaan yang adil dan beradab". Menurut Suhardin (2012) artinya kesejahteraan menjadi salah satu hal utama yang harus dicapai oleh negara yaitu mewujudkan kesejahteraan umum.

Menurut Albert & Hahnel (1990) tingkat kesejahteraan seseorang dipengaruhi oleh pilihan dan tingkat kepuasan yang diperoleh. Semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi pula tingkat utilitas yang bisa dicapai, dan semakin banyak kombinasi barang yang bisa diperoleh untuk memenuhi kebutuhan. Artinya semakin tinggi pendapatan maka tingkat kesejahteraan seseorang juga akan semakin tinggi. Ukuran kesejahteraan yang ideal akan mencerminkan utilitas total yang diperoleh dari semua barang dan jasa yang dikonsumsi (Hentschel & Lanjouw, 1997). Ukuran kesejahteraan masyarakat disebut dengan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah seperangkat program yang mendistribusikan kembali sumber daya di antara masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat (Lu, et al, 2013).

Kesejahteraan dalam ukuran rumah tangga sangat penting untuk dicapai, karena hal ini akan berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Masalah kesejahteraan sangatlah rumit karena negara harus mengeluarkan kebijakan dan mempersiapkan anggaran untuk berbagai kebutuhan, terutama untuk pembangunan. Fokus utama dan masalah pada pertumbuhan ekonomi adalah bagaimana sumber daya harus dialokasikan seiring berjalannya waktu dan bagaimana investasi, baik secara fisik atau infrastruktur, sumber daya manusia atau dalam penelitian dan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dilakukan

secara tepat. Laju pertumbuhan ekonomi yang optimum adalah laju apabila pengorbanan konsumsi sekarang dapat menghasilkan tambahan produksi pada masa yang akan datang dan sesuai dengan kebutuhan/preferensi masyarakat (Beckerman, 1973).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan utama pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan rumah tangga melalui pemberian akses layanan keuangan kepada masyarakat miskin sebagai pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Peran Usaha UMKM di Indonesia sangat signifikan bagi perekonomian terutama dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Indonesia memiliki jumlah UMKM yang tidak sedikit. Pada tahun 2017, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 62 juta unit atau sekitar 99% dari jumlah pelaku usaha di seluruh Indonesia. Hingga ini menyebabkan hingga saat ini, UMKM masih merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat menopang perekonomian Indonesia. Hal ini terbukti dari kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja serta ekspor yang cukup besar. Tercatat pada tahun 2019, kontribusi sektor UMKM terhadap PDB yang terus meningkat menjadi sebesar 60,51%. Kontribusi sektor UMKM terhadap penyerapan total tenaga kerja pada dunia usaha juga tinggi, yaitu sebesar 96,92%, selain itu kontribusi sektor UMKM terhadap total ekspor non migas mencapai 15,65% (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021).

Menurut BPS (2020) menerangkan bahwa kesejahteraan dapat diukur dengan beberapa indikator objektif. BPS fokus kepada aspek yang dapat diukur secara uang atau rasio. Perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yaitu Kepadatan Penduduk, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Ukuran Kesejahteraan oleh BPS tersebut juga sesuai dengan *better life index* oleh OECD yang terdiri dari indikator objektif yaitu, pendapatan, Pekerjaan, Perumahan, Kesehatan, Pendidikan dan Kualitas Lingkungan. Meskipun terdapat indikator objektif yang serupa dengan BPS, OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) menyampaikan bahwa kesejahteraan juga bukan hanya sesuatu

yang bisa diukur dengan uang, akan tetapi juga bagaimana kualitas hubungan dengan keluarga dan lingkungan, serta bagaimana kondisi emosional seseorang. Dalam indikator better life index oleh OECD ini, diakomodir mengenai kebutuhan emosional selain dari kebutuhan fisik yang menjadi dasar bagi kesejahteraan manusia (OECD, 2020).

Pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama pemerintah dalam menyusun kebijakan dan distribusi anggaran negara. Pemerintah berusaha meningkatkan kesejahteraan warganya dan menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan upaya seperti yang diamanatkan dalam pembukaan UUD, 1945. Salah satu upaya tersebut adalah melalui pembiayaan dan pemberian kredit terhadap UMKM. Pembiayaan mikro terbukti meningkatkan standar hidup masyarakat miskin dan memberikan kesempatan untuk keluar dari garis kemiskinan terutama pada penerima kredit mikro perempuan (Khandker, 2005). Pembiayaan mikro tidak hanya memberikan dampak pada level individu dan rumah tangga (Littlefield, et al, 2003), namun juga memberikan dampak pada level negara (Khandker 2005). Kredit mikro menghasilkan dampak positif dengan meningkatkan lapangan kerja pada tingkat rumah apabila dibandingkan dengan peningkatan pada sektor ekonomi lainnya. Begitu juga pada tingkat ekonomi makro, kredit mikro hanya memberikan dampak yang kecil pada peningkatan produksi (Thanh, Saito, & Duong, 2019).

Bantuan modal usaha diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana pemerintah berusaha meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021). Pemerintah juga memberikan bantuan berupa modal awal berupa bantuan sosial dan pinjaman kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE), yaitu kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga (Kementerian Sosial, 2021). Pembiayaan terhadap pelaku usaha mikro yang belum dapat dibiayai melalui KUR dilakukan dengan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan

terbawah yang disalurkan melalui berbagai badan usaha dan lembaga keuangan mikro (Kementerian Keuangan, 2021).

Penyaluran kredit untuk pelaku UMKM ini dilakukan dengan Kredit Mikro yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan non Bank dan Lembaga Keuangan Mikro. Pelaku UMKM maupun masyarakat yang membutuhkan dapat mengakses kredit mikro melalui berbagai lembaga tersebut. Kredit mikro di Indonesia sendiri merupakan layanan yang unik dimana pemberian pinjaman ditujukan kepada pelaku usaha yang feasible namun belum memenuhi syarat pada pinjaman perbankan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk program kredit mikro. Berbagai program kredit mikro telah diluncurkan oleh pemerintah Indonesia, mulai dari proyek Bimbingan Masyarakat dan Swasembada Beras pada tahun 1970an. Pada tahun 2021 pemerintah Indonesia menyediakan dana untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui dukungan terhadap UMKM dan Korporasi dengan pagu Rp161,20 triliun, dana ini dimanfaatkan antara lain untuk pemberian Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), IJP UMKM dan Korporasi, Penempatan Dana pada bank, dan Subsidi Bunga (Kementerian Keuangan, 2021). UMKM pada berbagai lembaga keuangan Bank dan Non Bank mendapatkan subsidi bunga pinjaman sesuai dengan PMK 65 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi bunga/ subsidi margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Khusus untuk program KUR, menurut kementerian koordinator bidang ekonomi (2020) realisasi penyaluran semenjak Agustus 2015 sampai dengan 31 Desember 2020 telah mencapai nilai Rp 670,5 Triliun dengan utang beredar sebesar Rp 231,2 Triliun, dan non performing loan (NPL) sebesar 0,46 persen. Untuk program KUBE, Kementerian Sosial sendiri telah menyalurkan bantuan dengan total Rp47 miliar pada tahun 2020 kepada lebih dari 23 ribu penerima manfaat yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Rofik, 2020). Badan Usaha Milik Desa yang berperan sebagai Lembaga Keuangan Mikro dibiayai oleh dana APBDesa yang

digelontorkan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya untuk membiayai kegiatan dan pembangunan desa.

Pemberian kredit mikro terhadap pelaku usaha tidak selalu mendapatkan hasil positif, namun ternyata juga bisa memberikan dampak negatif. Atmadja, et al (2016 & 2018) menemukan hubungan negatif antara Kredit Usaha Rakyat/microfinance dengan kemungkinan pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan. Dampak kredit mikro terhadap kesejahteraan pada pinjaman kelompok untuk Bangladesh adalah kecil atau tidak signifikan secara statistik (Roodman & Morduch, 2009). Penelitian di vietnam menemukan bahwa kredit mikro tidak menciptakan dampak yang signifikan secara statistik terhadap pendapatan atau konsumsi (Nhgiam, Coelli, & Rao, 2012).

Kesejahteraan rakyat Indonesia diharapkan mengalami perbaikan setiap tahunnya melalui berbagai program kredit mikro tersebut. Menurut BPS indikator kesejahteraan di Indonesia memang mengalami perbaikan, namun masih belum seluruh indikator tersebut bernilai baik. Data pada tahun 2020 menunjukkan bahwa masih banyak rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki tempat buang air besar, sumber air bersih, akses air minum yang layak, dokumen kependudukan dan jaminan kesehatan. Pada sisi ekonomi, ketimpangan pendapatan masih terjadi secara nyata. Gini rasio indonesia pada september 2020 adalah pada angka 0,385. Artinya masih terdapat ketimpangan dalam distribusi pendapatan masyarakat Indonesia. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk para pelaku UMKM, pengeluaran terbesar masih didominasi oleh kelompok pendapatan 20% atas dan 40% menengah dengan kontribusi pengeluaran sekitar 82% dibanding dengan kelas 40% terbawah yang hanya menyumbang 18% pengeluaran (BPS, 2020).

Kebijakan ekonomi memiliki peran untuk memberi prinsip yang rasional bagi bisnis sebagai kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tidak hanya mengarah pada kebutuhan pelaku ekonomi tertentu dan jangka pendek, akan tetapi juga memberi surplus bagi kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Aktifitas pasar akan banyak mempengaruhi seberapa optimal kegiatan ekonomi yang berlangsung tersebut. Adanya banyak kepentingan pelaku ekonomi dalam suatu pasar juga bisa menimbulkan dampak negatif untuk terwujudnya ekonomi kesejahteraan karena

kompetisi pasar membuat kepentingan pribadi pelaku ekonomi menjadi lebih utama. Diperlukan adanya ilmu kesejahteraan ekonomi dalam menentukan kebijakan untuk kegiatan ekonomi agar terciptanya suatu kondisi yang sejahtera dalam skala bermasyarakat ataupun lingkungan keluarga. Ekonomi Kesejahteraan merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang berhubungan dengan itu (O'Connel, 1982). Ekonomi kesejahteraan adalah kerangka kerja yang digunakan oleh sebagian besar ekonom publik untuk mengevaluasi penghasilan yang diinginkan masyarakat (Rosen, 2005). Ekonomi kesejahteraan menyediakan dasar untuk menilai prestasi pasar dan pembuat kebijakan dalam alokasi sumberdaya (Besley, 2002).

Program Kredit Mikro terhadap UMKM memiliki fungsi dan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, melalui pemberian akses kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan pembiayaan pada lembaga keuangan. Dengan besarnya dana yang telah dikeluarkan pemerintah untuk berbagai program kredit mikro, diharapkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Pada kenyataannya, kesejahteraan masyarakat Indonesia masih rendah dilihat dari berbagai indikator. Berbagai hasil positif dan negatif atas dampak kredit mikro terhadap kesejahteraan ditemukan pada penelitian di Indonesia namun belum dilakukan pengujian untuk seuruh wilayah Indonesia, penambahan indikator selain dari pengeluaran per kapita dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah menjadi alasan untuk meneliti dampak kredit mikro terhadap kesejahteraan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap kesejahteraan penerima Kredit di Indonesia?
2. Bagaimana dampak pemberian Kredit Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terhadap kesejahteraan penerima Kredit di Indonesia?
3. Bagaimana dampak pemberian Kredit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terhadap kesejahteraan penerima Kredit di Indonesia?

4. Bagaimana dampak pemberian Kredit Mikro terhadap kesejahteraan pelaku usaha di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui seberapa besar dampak pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap kesejahteraan penerima Kredit di Indonesia.
2. Mengetahui seberapa besar dampak pemberian Kredit Usaha Bersama (KUBE) terhadap kesejahteraan penerima Kredit di Indonesia.
3. Mengetahui seberapa besar dampak Kredit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terhadap kesejahteraan penerima Kredit di Indonesia.
4. Mengetahui seberapa besar dampak pemberian Kredit Mikro terhadap kesejahteraan pelaku usaha di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan sudut pandang baru bagi peneliti dalam bidang kesejahteraan dan kredit mikro. Penelitian ini diharapkan memberi informasi mengenai program mana saja yang memberikan dampak terbaik bagi kesejahteraan di Negara Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi institusi dan peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian dengan berbagai metode statistik, contohnya Propensity Score Matching seperti yang digunakan dalam penelitian ini.

